



RILIS
KUNJUNGAN KERJA (KUNKER) SPESIFIK BIDANG PENDIDIKAN
KOMISI X DPR RI KE PROVINSI JAWA TENGAH
PADA MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2024—2025
TANGGAL 26—28 AGUSTUS 2024

=====

Komisi X DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Pendidikan ke Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 26 s.d 28 Agustus 2024, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dr. H. Abdul Fikri Faqih, M.M. selaku Ketua Tim, beserta Anggota Komisi X DPR RI dari perwakilan berbagai Fraksi, dan didampingi oleh pejabat Kemendikbudristek RI. Dalam kunjungan ke SMAN 1 Semarang, Kepala Sekolah SMAN 1 Semarang menyatakan bahwa sekolah ini dikukuhkan sebagai penyelenggara PPDB terbaik se-Jawa Tengah, dan mampu berkolaborasi dalam menghadapi setiap masalah, misalnya pencegahan kekerasan di satuan pendidikan.

Kemudian dalam pertemuan dengan Pj Gubernur Jawa Tengah bertempat di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kadis Dr. Uswatun Khasanah menyampaikan adanya permasalahan unit sekolah baru, PPDB, guru penggerak, dan kebijakan merdeka belajar. Abdul Fikri Faqih dalam sambutannya, menyoroti kebijakan Kemendikbudristek sejak akhir 2019, pada episode pertama yang berisi kebijakan asesmen nasional, ujian sekolah berstandar nasional (USBN), rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), dan penerimaan peserta didik baru (PPDB), sampai episode 26 yang berisi kebijakan transformasi standar nasional dan akreditasi pendidikan tinggi. Fikri berpandangan bahwa Kemendikbudristek RI ingin melakukan transformasi pendidikan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (pemerintah daerah, keluarga, guru, institusi pendidikan, DUDI, masyarakat) termasuk peserta didik menjadi agen perubahan guna mencapai pendidikan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, Fikri mengingatkan bahwa kondisi penyelenggaraan pendidikan di seluruh Indonesia sangat beragam baik dari sisi geografis, kondisi satuan pendidikan, maupun mutu guru dan tenaga kependidikan.

Terkait isu sistem zonasi dalam kebijakan PPDB yang membuat peserta didik kesulitan memperoleh sistem pendidikan yang layak, Fikri berpendapat bahwa sistem zonasi ini harus dievaluasi agar permasalahan dalam PPDB tidak terulang lagi. Selain itu, kebijakan dari Kemendikbudristek harus berbasis pada prinsip keadilan. Sebagai contoh, adanya program penggerak yang berpotensi melahirkan kelompok elit yang menciptakan diskriminasi dalam ekosistem pendidikan Indonesia.

Sementara itu, Ombudsman menyarankan agar semua pemangku kepentingan pendidikan dapat duduk bersama dalam memetakan PPDB. Sekolah swasta perlu memikirkan akses pendidikan karena membangun sekolah baru membutuhkan upaya usaha dan yang luar biasa. Kemudian perwakilan dari perguruan tinggi, diwakili Rektor Universitas Negeri Semarang, berpandangan bahwa terkait penerimaan mahasiswa baru, orang tua tidak perlu khawatir, karena untuk jalur prestasi, perguruan tinggi tidak hanya menerima mahasiswa dari sekolah negeri saja tetapi juga dari sekolah swasta.

Semarang, 28 Agustus 2024

Tim Kunker Spesifik Bidang Pendidikan Komisi X DPR RI ke Provinsi Jawa Tengah.